

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PANGKALAN
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN PANGKALAN
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan izin-Nya, penyusunan *Buku Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Tahun 2026* ini akhirnya dapat diselesaikan.

Penyusunan buku ini bertujuan sebagai pedoman bagi Kecamatan Pangkalan dalam melaksanakan kebijakan program prioritas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selain itu, buku ini juga menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Unit Kantor Kecamatan Pangkalan selama tahun 2026.

Pemanfaatan buku ini tidak hanya sebagai pedoman bagi Camat Pangkalan beserta seluruh staf, tetapi juga sebagai dasar penyusunan data, baik data dasar, data proses, maupun data dampak atau hasil. Data tersebut dikompilasi secara terstruktur berdasarkan seksi-seksi dan subbagian di lingkungan Kecamatan Pangkalan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penyusunan buku ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini.

Kami juga menyadari bahwa dalam penyusunan *Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Tahun 2026* ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang perlu disempurnakan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Sebagai penutup, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Karawang, 30 Juli 2025


CAMAT PANGKALAN
CATUR TEGUH IMAM SUGIARTO, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19830411 200112 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1-3
1.2 Landasan Hukum	3-5
1.3 Maksud Dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5-6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu	7
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	7-15
Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16-18
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review terhadap rancangan RKPD	19-24
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	25-27
BAB III 1.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28-29
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3 Program Dan Kegiatan Prioritas	29-35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Kebijakan Umum	36
4.2 Rencana Kerja dan Pendataan	36-40
BAB V 1.2 PENUTUP	41
1.3 LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.1	Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	2
1.2	Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD	3

DAFTAR TABEL

2.1.1	Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan s/d Tahun 2025 Tahun Berjalan Kabupaten Karawang	6-10
2.2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang	13
2.4.1	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Karawang	16-19
2.5.1	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Karawang	21
3.3.1	Kode, Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	24-25
3.3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	26-29
4.2.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	31-34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Proses ini mencakup tahapan penyusunan rencana yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound* atau SMART), terpadu, serta tanggap terhadap dinamika perubahan; tahapan penetapan rencana; tahapan pengendalian pelaksanaan rencana; dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Dalam suatu perencanaan, tentu perlu menghindari kegagalan, seperti dalam istilah umum "*Failing to plan is planning to fail*", yang berarti "gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan."

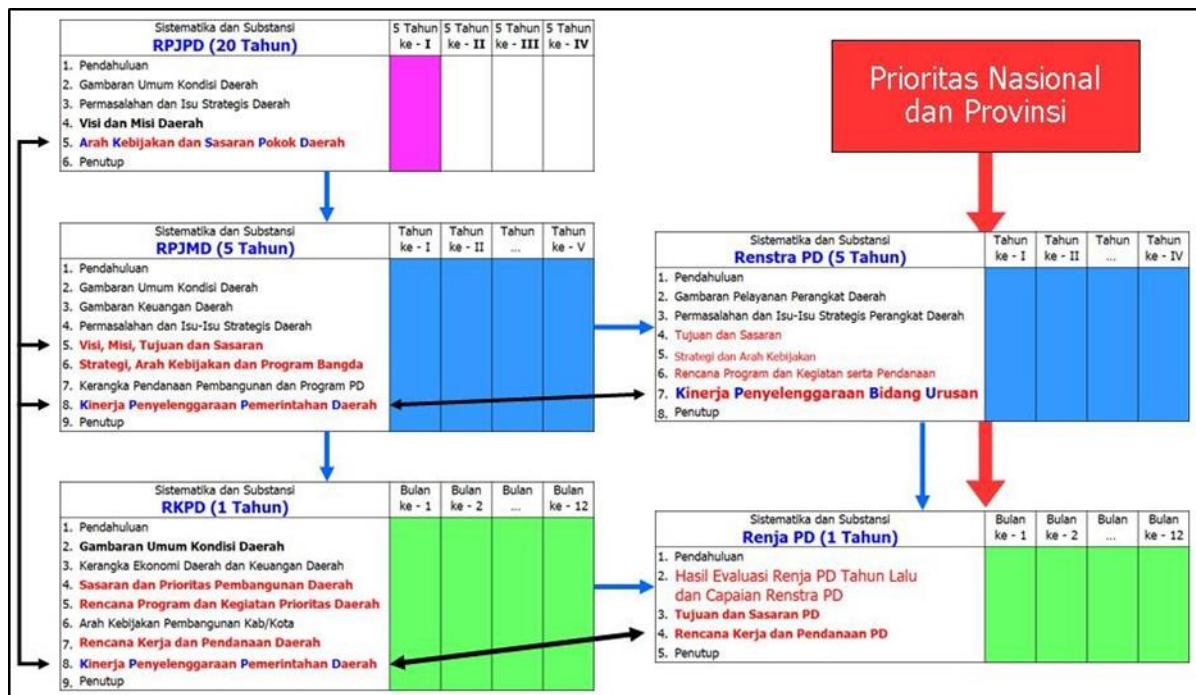
Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah terdiri atas rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang urusan pemerintahan guna mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Kerja Kecamatan mendukung unsur penunjang pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, keterkaitan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada **Gambar 1.1**.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode satu tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

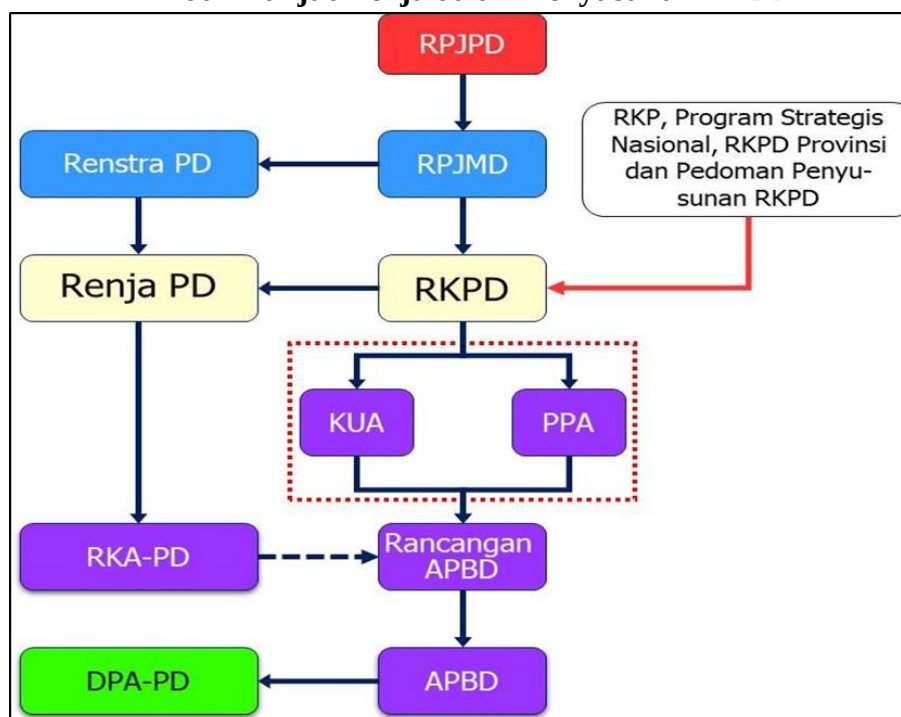


Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Pembahasan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah atau Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi, serta kelompok sasaran.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Verifikasi rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat satu minggu setelah peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

Keterkaitan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada **Gambar 1.1**. Sementara itu, tindak lanjut dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah hingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada **Gambar 1.2**.

Gambar 1.2
Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6791).
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun ... tentang ...(Diisi saat Rancangan atau Rancir).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021–2026.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025

24. Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
25. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Bupati Karawang Nomor 36 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan program dan kegiatan prioritas yang bersinergi serta selaras dengan pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026. Selain itu, penyusunan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, menjawab isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi kecamatan, serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026. Dokumen ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2026 melalui perencanaan kinerja tahunan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2026 adalah:

1. Menyusun dokumen perencanaan kinerja tahunan yang operasional.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang guna memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2026.
3. Menjadi instrumen akuntabilitas kinerja Tahun 2026 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang unsur kewilayahan serta laporan kinerja perangkat daerah.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang Tahun 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISANAN

Penyajian Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Perangkat

Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, hasil review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi hasil telaahan terhadap kebijakan nasional, uraian tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan prioritas yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) sesuai dengan bidang urusan Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 merupakan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan (Renja) Pangkalan Tahun 2024 serta perkiraan capaian Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan anggaran, serta kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 dapat tercapai. Evaluasi ini juga berfungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2021–2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2026, dengan anggaran yang difokuskan pada urusan pemerintahan bidang unsur kewilayahan.

2.1.1 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2024 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN BERJALAN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 dilakukan terhadap 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan,
- b. Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Serta
- c. Hasil Rencana Program dan Kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan s/d Tahun 2025 Tahun Berjalan Kabupaten Karawang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
7.01.01.2.01.0001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	4 Laporan		100%
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100 %
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12 Orang/ Bulan	11 Orang/ Bulan	11 Orang/ Bulan	100%	8 Orang/ Bulan		100 %
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen		100 %
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		100 %
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100 %
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		15 paket	14 paket	14 paket	100%	11 paket		100 %
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100 %
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		45 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang		100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket		100%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket		100%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket		100%
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit		100%
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan		100%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	8 Unit		100%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit		1100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit		100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan		100%
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		8 laporan	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan		100 %
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	10 Lembaga Kemasyarakatan		100 %
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan		100 %
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.10.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan		100 %
7.01.06.2.10.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	8 Laporan		100 %

Keterangan : Indikator kinerja sub kegiatan mengikuti Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat disajikan pokok-pokok substansi antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan :
 - a. Program administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tahun 2023 mencapai 100%
 - b. Program administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tahun 2024 mencapai 100%
 - c. Program administrasi keuangan perangkat daerah kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 mencapai 100%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota tahun 2023 mencapai 100%, tahun 2024 mencapai 100% dan tahun 2025 mencapai 100%
 - b. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tahun 2023 mencapai 100%, tahun 2024 mencapai 100 % dan tahun 2025 mencapai 100 %
 - c. Program pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan tahun 2023 mencapai 100 %, tahun 2024 mencapai 100 % dan tahun 2025 mencapai 100 %
 - d. Program koordinasi keamanan dan ketertiban umum tahun 2023 mencapai 100 %, tahun 2024 mencapai 100 % dan tahun 2025 mencapai 100 %

2.1.2 CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan dan pencapaian Renstra Kecamatan Pangkalan s/d tahun 2024 dapat diketahui target kinerja Kecamatan Pangkalan mencapai 100 % sedangkan realisasi serapan anggarannya mencapai 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 68 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum, Program dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Seksi Pemerintahan;

- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok di atas, Kecamatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan instansi otonom dan vertikal yang ada diwilayah kerjanya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kecamatan sebagai perangkat daerah diharuskan menyusun rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah yang mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Rencana kerja tersebut disusun pada T-1 atau satu tahun sebelumnya, menyesuaikan dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sehingga tercipta harmonisasi antara RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja perangkat daerah, dan RKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 memuat kajian evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 serta perkiraan capaian pada tahun 2025. Penyusunan dokumen ini mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun berjalan, yang seharusnya telah disahkan pada saat penyusunan rencana kerja. Selain itu, dokumen ini juga dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan dalam pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, evaluasi ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari pencapaian dan realisasi yang akan disajikan dalam capaian kinerja tahun 2024. Target sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kecamatan Pangkalan, serta hasil capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kecamatan Pangkalan, tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan
Kabupaten Karawang

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	IKM Layanan Kecamatan (PATEN) Pangkalan	-	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	65,00	65,00	65,10	65,11	65,25	65,30	65,00	65,00	65,10	65,30	Indikator Sasaran Kecamatan
2	Keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	-	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator Sasaran Kecamatan
3	Sakip Kecamatan Pangkalan(Tingkat kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Pangkalan	-	Skor Sakip Kecamatan Pangkalan(Tingkat kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Pangkalan	65,00 (B)	65,05 (B)	65,10 (B)	65,15 (B)	65,20 (B)	65,30 (B)	65,00 (B)	65,05 (B)	65,10 (B)	65,30 (B)	Indikator Sasaran Kecamatan

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah kecamatan dapat melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menyusun rencana kerja sebagai strategi pencapaian tujuan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Kecamatan Pangkalan menghadapi beberapa isu penting, yaitu sebagai berikut:

a. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi indikator kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Pangkalan memiliki tingkat pelayanan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian indikator layanan masyarakat yang berhasil terealisasi di atas 100% pada tahun sebelumnya.

b. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pangkalan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah. Permasalahan utama tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

c. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta Program Nasional/Internasional Capaian seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kecamatan Pangkalan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian misi keempat Bupati Karawang, yaitu *"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas."* Selain itu, capaian tersebut juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi pada pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, optimalisasi fungsi pemerintahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang andal.

d. Formulasi Isu-Isu Penting dalam Bentuk Rekomendasi dan Catatan Strategis Kecamatan Pangkalan perlu menindaklanjuti berbagai isu strategis dengan merumuskan program dan kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan perlu menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan.
2. Pemerintah kecamatan harus meningkatkan sinergi antara perencanaan dan pelaksanaan agar target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kapasitas aparatur serta menambah jumlah aparatur. Aparatur memiliki peran penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan serta dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan harus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur serta menambah jumlah aparatur agar kebutuhan secara kuantitas dan kualitas dapat terpenuhi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang merupakan langkah awal bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Penyusunan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan tahunan tahun 2026, yang mencakup program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dianalisis berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Hasil analisis tersebut digunakan

untuk menentukan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Karawang.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD bertujuan untuk membandingkan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dengan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah serta tingkat kinerja yang telah dicapai. Selain itu, telaahan ini juga mempertimbangkan arahan Bupati Karawang terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap perangkat daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Karawang tahun 2026 dilakukan melalui identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur atau target sasaran, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di Kecamatan Pangkalan. Hasil review ini menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.

Berdasarkan hasil telaahan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan awal RKPD telah disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pangkalan. Penyelarasan ini dilakukan melalui kajian bersama untuk memastikan efisiensi kegiatan serta kesesuaian jumlah anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Karawang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pangkalan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan 1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Kec Pangkalan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan			Tujuan 1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Kec Pangkalan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan			
	Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pangkalan	Kec Pangkalan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) Pangkalan			Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Pangkalan	Kec Pangkalan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) Pangkalan			
01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec Pangkalan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec Pangkalan	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	396.550.000	
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	56.250000	
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	5.000.000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 aporan		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 aporan	308.300000	
02	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Pangkalan		100%		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec Pangkalan		100%	21.200.000	
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Kec Pangkalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	5 Lembaga		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kec Pangkalan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	5 Lembaga	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakat an		Perencanaan Pembangunan di Desa		Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakat an		
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12.200.000	
03	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Pangkalan	Prosentasi Koordinasi Trantibum	100%		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec Pangkalan	Prosentasi Koordinasi Trantibum	100%	253.800.000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	253.800.000	
04	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Pangkalan		100%		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec Pangkalan		100%	13.600.000	
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Pangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec Pangkalan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 Dokumen	6.300.000	
2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	7.300.000	
05	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kec Pangkalan		100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kec Pangkalan		100%	3.289.066.800	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Pangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Pangkalan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ Bulan	2.878.596.800	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Setel		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Setel	10.000.000	
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 Paket	4.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kantor		yang Disediakan					Bangunan Kantor yang Disediakan			
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	32.300.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Pangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.200.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Pangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Pangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	2.000.000	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	40.500.000	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.400.000	
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 :aporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.200.000	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Pangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec Pangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	123.450.000	
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Pangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Pangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		79.020.000	
14	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Pangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Pangkalan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	48.800.000	
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Pangkalan	4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Pangkalan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Pangkalan	4 laporan	7.200.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pangkalan, usulan dari para pemangku kepentingan menjadi bagian yang disandingkan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pihak desa, instansi, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), koordinator wilayah (Koorwil), serta kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan. Proses ini dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilakukan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat dalam pembangunan diwujudkan melalui keikutsertaan dalam musyawarah tersebut. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, merupakan forum antarpelaku yang bertujuan menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk tingkat nasional dan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk tingkat daerah.

Perencanaan pembangunan berbasis partisipasi berkembang dari kesadaran bahwa keberhasilan suatu program sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak yang terkait, yang dikenal sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan program, dan besarnya komitmen tersebut ditentukan oleh sejauh mana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan melalui Musrenbang, yaitu forum di mana rancangan rencana pembangunan dibahas dan dikembangkan bersama oleh semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini mencakup unsur pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, kelompok profesional, organisasi nonpemerintah, dan lainnya.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan bagi pemangku kepentingan di tingkat desa atau kelurahan untuk menentukan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Musyawarah ini berdasarkan masukan dari desa atau kelurahan serta menghasilkan kesepakatan mengenai rencana kegiatan lintas desa atau kelurahan dalam satu kecamatan. Hasil Musrenbang kecamatan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan, yang kemudian diajukan kepada perangkat daerah terkait untuk menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) kabupaten atau kota pada tahun berikutnya. Musrenbang desa atau kelurahan dilaksanakan setiap tahun pada bulan September, dengan output berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja Perangkat Daerah kecamatan.

Kegiatan perencanaan pembangunan ini terdiri atas tiga kategori, yaitu usulan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Musrenbang perempuan dan anak, serta usulan dari kecamatan. Puncak Musrenbang tahun 2025 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 diselenggarakan secara langsung (*offline*). Sebelum itu, telah dilakukan penjangkaran daftar usulan dari kepala desa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Karawang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pangkalan

No	Nama Desa	Usulan	Permasalahan	Besaran/ Volume	Lokasi/Alamat	OPD	Bidang
1	Ciptasari	Pembangunan Emplacement/Pengarugan Halaman Bangunan Gedung Kelurahan dan Kecamatan	Pembangunan emplacement/pengarugan halaman bangunan kecamatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan ruang yang nyaman dan aman bagi masyarakat.	Paket	Kp. Karajan Rt. 002 Rw. 001 , Kab. Karawang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur
2.	Cintaasih	Pembangunan MCK dengan Sumur Bor	Pembangunan MCK dengan sumur bor sangat diperlukam untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai dan aman	Paket	Kp. Cijago RT. 015 RWR. 008 Desa Cintaasih (Paud Melati), Kab. Karawang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur
3	Ciptasari	Peningkatan Jalan dan Jalan Poros Desa	Sangat diperlukan Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dengan meningkatkan akses ke sumber daya alam, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Paket	Kp. Cireundeu Rt. 011 Rw. 003, Kab. Karawang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur
4	Jatilaksana	Peningkatan Jalan Lingkungan	Sangat diperlukan Untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah dengan meningkatkan akses ke sumber daya alam, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Paket	Kp. Cibeureum RT 006 RW 003 Desa Jatilaksana, Kab. Karawang	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Infrastruktur
5	Kertasari	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD	Kondisi ruang kelas yang tidak memadai, Untuk mengurangi risiko Belajar mengajar	Paket	Dusun Hegarmanah Kp. Bakan Mulya Rt. 007 Rw. 002, Kab. Karawang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Infrastruktur
6	Medalsari	Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL)	Sangat diperlukan guna membantu meningkatkan efisiensi pertanian dengan	Paket	Kp.Pasir Peundeuy RT 010 s.d	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	Infrastruktur

7	Mulangsari	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD	memotong dan menghancurkan tanaman secara cepat dan efektif, sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Kondisi ruang kelas yang tidak memadai, Untuk mengurangi risiko Belajar mengajar	Paket	Kp. Malingping Rt.007 Rw.005, Kab. Karawang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Infrastruktur
8	Tamanmekar	Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang SD	Kondisi ruang kelas yang tidak memadai, Untuk mengurangi risiko Belajar mengajar	Paket	CITAMAN RT 007 RW 003, Kab. Karawang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Infrastruktur
9	Tamansari	Pembangunan RKB Jenjang SD	Kondisi ruang kelas yang tidak memadai, seperti kerusakan, kekurangan bangunan, fasilitas, dan lain-lain.	Paket	Kp. Taneuh Beurum Rt.003/002 Desa Tamansari, Kab. Karawang	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Infrastruktur

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2). Jenjang perencanaan tersebut mencakup perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Di tingkat kabupaten, jenjang perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap perangkat daerah wajib menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Renja harus berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) serta mengacu pada RKPD. Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan baik secara langsung oleh perangkat daerah maupun melalui partisipasi masyarakat. Dengan demikian, mekanisme perencanaan pembangunan daerah harus mengedepankan pendekatan yang partisipatif. Untuk mendukung proses tersebut, diperlukan kemampuan teknis perencanaan yang baik agar dapat mendorong perencanaan yang lebih terarah dan efektif. Hal ini juga bertujuan mengubah pola perencanaan dari sekadar daftar belanja (*shopping list*) menjadi rencana kerja yang konkret (*working plan*).

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “*PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar*”. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKP 2026 adalah:

1. Sinergi antar-stakeholder
Para pemangku kepentingan diharapkan menyelaraskan rencana kerja, baik Renja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun RKPD, dengan RKP 2026.
2. Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah
Rencana pembangunan nasional dan daerah harus disinergikan dengan memanfaatkan forum rapat koordinasi dan musyawarah untuk menentukan proyek-proyek prioritas.
3. Pendanaan multisumber
RKP 2026 tidak hanya mencakup pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari sumber lain, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.
4. *Clearing House* untuk proyek prioritas
Penyusunan RKP 2026 diperkuat melalui mekanisme *Clearing House* guna memastikan proyek prioritas, khususnya *Major Projects*, berjalan sesuai amanat Presiden.
5. Identifikasi kebijakan, regulasi, dan pendanaan
Kegiatan prioritas harus diidentifikasi berdasarkan kerangka kebijakan, regulasi, serta skema pendanaannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). *Kick-Off Meeting* Penyusunan RKP 2026 diselenggarakan untuk menyampaikan tema,

sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP 2026 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan dalam Bab II serta dengan mempertimbangkan fungsi Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2025–2029. Perumusan ini dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah yang bertujuan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Merujuk pada visi dan misi Kabupaten Karawang tahun 2025–2029 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang, Kecamatan Pangkalan mendukung Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2026–2029, yaitu “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas*” Oleh karena itu, disusunlah tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan
Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Pangkalan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN) Pangkalan
Sasaran 1.2 : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses Pembangunan
Tujuan 2 Terwujudnya tata Kelola kelembagaan pemerintah yang baik dan bersih di Kecamatan Pangkalan	Nilai SAKIP Kecamatan Pangkalan (Tingkat Kualitas tata kelola pemerintahan di Kec. Pangkalan)
Sasaran 2.1 : Manajemen tata kelola pemerintahan di Kecamatan Pangkalan yang baik dan bersih	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen tata Kelola pemerintahan di Kecamatan Pangkalan

Sasaran yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran-sasaran Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang menjadi suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itu Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang merumuskan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Tahun 2021-2026.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengatur hasil verifikasi, validasi, dan

inventarisasi pemutakhiran, kodefikasi, serta nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Keputusan ini diterbitkan untuk mencapai keselarasan, kejelasan, dan ketertiban dalam perencanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Regulasi ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perangkat Daerah Kecamatan termasuk dalam klasifikasi perencanaan pembangunan pada bagian *(h) mengenai unsur kewilayahan*. Dalam implementasinya, terdapat beberapa penyesuaian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu perubahan mendasar dalam regulasi terbaru adalah jumlah program dan kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Kecamatan Pangkalan memiliki *5 program, 11 kegiatan, dan 23 subkegiatan* yang harus dijalankan.

Berikut disampaikan perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi pedoman saat ini.

Tabel 3.3.1
Kode, Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
7.01.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.01.01.2.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
7.01.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.02	<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i>
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04	<i>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.06	<i>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pangkalan pada tahun 2026 dengan total kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut mencapai **Rp 4.200.213.504.-** Seluruh program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang tahun 2026 telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100%	4.200.213.504	APBD		100%	4.200.213.504
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	7.293.400	APBD		100%	7.400.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangkalan	4 Laporan	7.293.400	APBD		4 Laporan	7.400.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	2.878.596.804	APBD		100%	2.879.700.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan	11 Orang/bulan	2.878.596.804,	APBD		8 Orang/ bulan	2.879.700.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	-	-	-		-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut			-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	70.867.500	APBD		100%	91.600.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	4 Paket	2.637.200	APBD		1 Paket	4.700.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	7.066.900	APBD		12 Paket	7.200.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	27.429.200	APBD		12 Paket	32.500.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	6.074.200	APBD		12 Paket	4.400.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangkalan	4 Paket	1.860.000	APBD		4 Paket	2.100.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pangkalan	4 laporan	25.800.000	APBD		4 laporan	40.700.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pangkalan	100%	328.246.000	APBD		-	-
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kec. Pangkalan	1 Unit	328.246.000	APBD		-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan	100%	33.095.200	APBD		100%	83.900.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangkalan	12 Laporan	2.500.000	APBD		12 Laporan	2.900.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Laporan	30.595.200	APBD		12 Laporan	30.600.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	-	-	-		-	-
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pangkalan	100%	138.844.700	APBD		100%	251.550.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Kec. Pangkalan	9 Unit	118.280.000	APBD		8 Unit	123.450.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Pangkalan	9 Unit	5.240.000	APBD		8 Unit	79.100.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Prosentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kec. Pangkalan	4 Unit	15.324.700	APBD		4 Unit	49.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pangkalan	100%	516.843.400	APBD		100%	369.950.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				116.995.000	APBD		100%	117.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kec. Pangkalan		116.995.000	APBD		100%	117.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Kec. Pangkalan	100%	30.360.600	APBD		100%	5.200.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah</i>	Kec. Pangkalan	1 Laporan	25.000.000	APBD		100%	56.250.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	Kec. Pangkalan	4 Laporan	5.360.600	APBD		100%	5.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Pangkalan	100%	369.487.800	APBD		100%	370.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>1 Laporan</i>	369.487.800	APBD		100%	370.500.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Pangkalan	100%	21.015.800	APBD		100%	21.600.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan	100%	21.015.800	APBD		100%	21.600.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>10 Lembaga Kemasyarakatan</i>	9.100.000	APBD		<i>10 Lembaga Kemasyarakatan</i>	9.200.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>4 Laporan</i>	11.915.800	APBD		<i>4 Laporan</i>	12.400.000
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangkalan	100%	194.745.400	APBD		100%	254.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pangkalan	100%	194.745.400	APBD		100%	254.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>2 Laporan</i>	194.745.400	APBD		100%	254.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangkalan	100%	10.6005.300	APBD		100%	11.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pangkalan	100%	10.6005.300	APBD		100%	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kec. Pangkalan	3 Dokumen	6.081.200	APBD		3 Laporan	6.500.000
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Pangkalan	4 Dokumen	2.947.900	APBD		4 Dokumen	3.000.000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Pangkalan	2 Laporan	1.636.200	APBD		2 Laporan	2.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 KEBIJAKAN UMUM

Kecamatan Pangkalan, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Camat Pangkalan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian visi dan misi Bupati.

Berdasarkan telaahan terhadap hasil evaluasi program/kegiatan Kecamatan Pangkalan tahun 2026 serta dengan mempertimbangkan isu-isu global, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Tahun 2025 memperhatikan beberapa aspek berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi, sumber daya yang akan digunakan, serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang ingin dicapai;
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkan tujuan tersebut;
- b. Kebijakan yang akan diterapkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan juga mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2026, yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Keberlanjutan program dan kegiatan, guna menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

4.2 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, peraturan ini diterbitkan untuk mencapai keselarasan, kejelasan, dan ketertiban dalam perencanaan pembangunan serta keuangan daerah. Kepmendagri tersebut merupakan penjabaran dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Perangkat Daerah Kecamatan termasuk dalam klasifikasi perencanaan pembangunan pada bagian (h), yang berkaitan dengan unsur kewilayahan. Beberapa penyesuaian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilakukan berdasarkan peralihan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga program dan kegiatan yang diakomodasi menjadi 5 program, 11 kegiatan, dan 23 subkegiatan.

Setiap Perangkat Daerah perlu mencermati keselarasan antara peraturan-peraturan baru tersebut, agar dapat menginput data ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD, sebagai aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertujuan untuk menjaga keselarasan antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pada tahun 2026, Kecamatan Pangkalan akan melaksanakan program dan kegiatan dengan total kebutuhan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini adalah **Rp.**

4.200.213.504.- yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seluruh program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan untuk tahun 2026 telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pangkalan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		100%	4.200.213.504	APBD		100%	4.250.300.000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	7.293.400	APBD		100%	7.400.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Pangkalan	4 Laporan	7.293.400	APBD		4 Laporan	7.400.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	2.878.596.804	APBD		100%	2.879.700.000
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pangkalan	11 Orang/bulan	2.878.596.804,	APBD		8 Orang/ bulan	2.879.700.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	-	-	-		-	-
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut			-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kec. Pangkalan	100%	70.867.500	APBD		100%	70.900.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	4 Paket	2.637.200	APBD		1 Paket	3.700.000
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	7.066.900	APBD		12 Paket	7.200.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	27.429.200	APBD		12 Paket	28.500.000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Paket	6.074.200	APBD		12 Paket	6.200.000
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Pangkalan	4 Paket	1.860.000	APBD		4 Paket	2.100.000
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Pangkalan	4 :aporan	25.800.000	APBD		4 laporan	26.700.000
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kec. Pangkalan	100%	328.246.000	APBD		-	-
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kec. Pangkalan	1 Unit	328.246.000	APBD		-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan	100%	33.095.200	APBD		100%	33.600.000
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pangkalan	12 Laporan	2.500.000	APBD		12 Laporan	2.900.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Pangkalan	12 Laporan	30.595.200	APBD		12 Laporan	30.600000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Pangkalan	-	-	-		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kec. Pangkalan	100%	138.844.700	APBD		100%	139..550.000
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Prosentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Kec. Pangkalan	9 Unit	118.280.000	APBD		8 Unit	120.00.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Kec. Pangkalan	9 Unit	5.240.000	APBD		8 Unit	5.300.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Prosentase Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Kec. Pangkalan	4 Unit	15.324.700	APBD		4 Unit	16.000.000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pangkalan	100%	516.843.400	APBD		100%	517.000.000
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				116.995.000	APBD		100%	117.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Kec. Pangkalan		116.995.000	APBD		100%	117.000.000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Kec. Pangkalan	100%	30.360.600	APBD		100%	5.200.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah</i>	Kec. Pangkalan	1 Laporan	25.000.000	APBD		100%	56.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>4 Laporan</i>	5.360.600	APBD		100%	5.400.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kec. Pangkalan	100%	369.487.800	APBD		100%	370.500.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>1 Laporan</i>	369.487.800	APBD		100%	370.500.000
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Pangkalan	100%	21.015.800	APBD		100%	21.600.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kec. Pangkalan	100%	21.015.800	APBD		100%	21.600.000
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>10 Lembaga Kemasyarakatan</i>	9.100.000	APBD		<i>10 Lembaga Kemasyarakatan</i>	9.200.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>4 Laporan</i>	11.915.800	APBD		<i>4 Laporan</i>	<i>12.400.000</i>
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pangkalan	100%	194.745.400	APBD		100%	200.000.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kec. Pangkalan	100%	194.745.400	APBD		100%	200.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>2 Laporan</i>	194.745.400	APBD		100%	200.000.000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pangkalan	100%	10.6005.300	APBD		100%	11.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kec. Pangkalan	100%	10.6005.300	APBD		100%	11.000.000
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>6.081.200</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Laporan</i>	<i>6.500.000</i>
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>4 Dokumen</i>	<i>2.947.900</i>	<i>APBD</i>		<i>4 Dokumen</i>	<i>3.000.000</i>
7.01.06.2.01.0018	<i>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Kec. Pangkalan</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>1.636.200</i>	<i>APBD</i>		<i>2 Laporan</i>	<i>2.500.000</i>

BAB V

PENUTUP

Istilah "*Failing to plan is planning to fail*" atau gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kegagalan dalam merencanakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan unsur kewilayahan sama dengan merencanakan kegagalan Kecamatan Pangkalan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini disusun sebagai perencanaan kinerja untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra Kecamatan Pangkalan serta RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2026.

Pada tahun 2026, Renja PD ini menjadi dasar akuntabilitas dan penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan. Renja PD ini harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Pangkalan untuk memastikan optimalisasi pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan dan RPJMD Kabupaten Karawang. Jika ketersediaan anggaran tidak mencukupi, maka diperlukan penentuan prioritas dan inovasi dalam pelaksanaan agar target kinerja Renstra Kecamatan Pangkalan tetap dapat dicapai.

Perencanaan tidak hanya berhenti pada tahap penyusunan dan penetapan rencana, tetapi juga harus mencakup pengendalian pelaksanaan rencana serta evaluasi hasil pelaksanaan. Oleh karena itu, standar prosedur pengendalian dan evaluasi harus diterapkan secara efektif. Dengan adanya pengendalian dan evaluasi, Kecamatan Pangkalan dapat membuktikan kinerjanya serta melakukan perbaikan yang diperlukan.

Saat Renja PD ini dijabarkan ke dalam RKA, maka pada saat yang sama harus dilakukan perencanaan teknis pelaksanaan tiap kegiatan. Penjabaran RKA yang lebih rinci dalam perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk memperjelas tahapan implementasi, sehingga target kinerja dan capaian program dapat terealisasi dengan optimal.

Karawang, 30 Juli 2025

CAMAT PANGKALAN



CATUR TEGUH IMAM SUGIARTO, S.STP., MM

Pembina

NP. 19830411 200112 1 004